

SINOPSIS

Runtuhnya rezim otoriter merupakan awal bagi rezim demokrasi untuk bertransisi, dan kemudian berkonsolidasi menjadi sistem politik dan pemerintahan yang bercirikan demokratis. Namun konsolidasi demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Perubahan rezim tidak selalu berupa demokrasi, rezim yang baru sering kali menjadi demokrasi terbatas, lemah dan tidak solid. Hal itu dikarenakan konsolidasi demokrasi disusupi oleh konsolidasi oligarki yang masih *massif* dan terus berkembang, menguat dan menyebar diberbagai *lini* institusi demokrasi. Partai politik sebagai salah satu pilar dan institusi berdemokrasi menjadi tempat bersarangnya konsolidasi oligarki yang tidak jarang mengakar. Di Indonesia, kebanyakan partai politik mengalami kesulitan melepaskan diri dari gejala-gejala oligarki. PDI-P misalnya, dari awal berdiri hingga saat ini masih mempertahankan figur Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Hal itu menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi pergantian pemimpin dalam waktu yang lama. Dalam demokrasi, menduduki jabatan dalam waktu yang lama mengandung bahaya bagi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menggali, menafsirkan, menjelaskan dan menganalisa bagaimana demokratisasi pada aspek regenerasi kepemimpinan di PDI-P.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Dengan memakai data primer yang didapat dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yang dianggap bisa memberikan data mengenai demokratisasi pada aspek regenerasi kepemimpinan di PDI-P, sedangkan data sekunder didapat dari dokumentasi dan studi pustaka. Unit analisa datanya adalah pengurus PDI-P dan pengamat politik. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknis analisis data dilakukan dengan menyusun data, memilah-milahnya menjadi suatu data yang dapat dikelola, kemudian dijelaskan dan dianalisis dengan mengutamakan kualitas analisis data berdasarkan atas teori demokrasi dan oligarki.

PDI-P sebagai partai yang mengklaem sebagai partai demokratis, terasa kontradiktif jika melihat proses demokrasi diinternalnya. Dalam pengambilan keputusan, proses demokratis yang dilakukan melalui forum-forum formal harus mendapat persetujuan dari Megawati, yang berperan sebagai penentu keputusan akhir. Dalam hal kompetisi, partisipasi dan kebebasan, PDI-P memiliki penjagaan terhadap elemen tersebut, Namun ada pengecualian pada tataran kompetisi ketua umum. PDI-P memiliki mekanisme pergantian ketua umum yang demokratis, namun tidak diikuti dengan pergantian pemimpin selama tiga periode berturut-turut. Megawati yang dijadikan sebagai ketua umum berturut-turut selama tiga periode, dipengaruhi oleh faktor trah Soekarno, stabilitas, soliditas, elektabilitas partai dan ada faktor kebelum siapan melakukan regenerasi. Tetapi sebenarnya wacana regenerasi ketua umum pernah mengemuka pada Kongres II PDI-P tahun 2005, namun wacana tersebut tidak mendapat tempat. Bahkan kelompok yang mengemukakan wacana tersebut dipaksa keluar dari struktur partai. Dengan demikian, PDI-P bukan tidak siap melakukan regenerasi kepemimpinan ketua umum, tetapi hal itu sengaja dirancang untuk tidak melakukan regenerasi.

PDI-P tidak melakukan upaya pencegahan oligarki terhadap demokrasi, justru membiarkan oligarki tumbuh di internal partainya. Desain Megawati sebagai ketua umum PDI-P yang terpilih berturut-turut selama tiga periode, merupakan desain politik atas penjagaan zona nyaman yang didasarkan pada stabilitas, soliditas dan elektabilitas partai disamping kepentingan stabilitas kekuasaan politik bagi elit politik di PDI-P. Dengan demikian, cara kerja demokrasi di internal PDI-P belum terlaksana sesuai dengan prinsip